

**KAJIAN PENCANTUMAN PERSETUJUAN ANGGOTA KELUARGA  
SEKANDUNG SELAIN PENERIMA HIBAH DALAM AKTA HIBAH  
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA  
(BURGERLIJK WETBOEK)**

**Oleh  
Nova Ramadhani  
NIM. 190574201008**

**ABSTRAK**

Pemberian hibah tidak boleh melanggar dan merugikan bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris menurut undang-undang. Sehingga persetujuan dari anggota keluarga sekandung (anak-anak) sangat dibutuhkan dalam proses hibah tersebut. Fenomena yang sering terjadi dalam penghibahan dimana tidak melibatkan anggota keluarga sekandung sebagai pihak yang memberikan persetujuan sehingga menimbulkan sengketa dikemudian hari. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kedudukan anggota keluarga sekandung dalam proses hibah dan mengetahui bagaimana urgensi dari pencantuman persetujuan anggota keluarga sekandung selain penerima hibah dalam akta hibah. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian Normatif dimana fokus penelitian untuk mengaji penerapan kaidah-kaidah dan norma-norma hukum positif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan anggota keluarga sekandung sebagai golongan I yang berdasar pada sistem waris *ab-intestato* sehingga berperan penting sebagai pihak yang memberikan persetujuan atas penghibahan yang dilakukan dari orang tua kepada salah satu anak kandungnya. Dengan diikutsertakan anak-anak kandungnya dalam proses hibah ini hak-haknya sebagai calon ahli waris terlindungi dan mengenai perlindungan hukum terdapat dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, yang diberikan melalui perundang-undangan dan hak untuk menuntut. Akta hibah yang mencantumkan persetujuan anggota keluarga sekandung ini lebih memberikan kepastian hukum dibandingkan akta hibah yang tidak mencantumkan persetujuan.

**Kata Kunci:** Persetujuan, Anggota Keluarga Sekandung, Akta Hibah.

**STUDY OF INCLUDING THE APPROVAL OF CONSULTING FAMILY MEMBERS OTHER THAN GRANT RECIPIENTS IN THE GRANT DEED BASED ON CIVIL LAW LAWS (BURGERLIJK WETBOEK)**

**By  
Nova Ramadhani  
NIM. 190574201008**

**ABSTRACT**

*Giving grants may not violate and harm the legal heirs (legitime portie). So the approval of siblings (children) is needed in the grant process. The phenomenon that often occurs in grants is that it does not involve members of the biological family as the party giving consent, causing disputes in the future. The purpose of this research is to find out the position of siblings in the grant process and to find out the urgency of including the approval of siblings other than recipients of grants in the deed of grant. The research method used is normative research where the research focus is to examine the application of positive legal principles and norms by taking a statute and case approach. The results of this study indicate that the position of biological family members as group I is based on the ab-intestate inheritance system so that they play an important role as parties who give approval for grants made from parents to one of their biological children. By including their biological children in the grant process, their rights as potential heirs are protected and regarding legal protection, there are two, namely preventive legal protection and repressive legal protection, which are provided through legislation and the right to sue. A deed of grant which contains the consent of the biological family members provides more legal certainty than a deed of grant which does not include consent.*

*Keywords: Consent, Biological Family Members, Deed of Grant.*